

## BAB III

### KEADAAN SOSIAL POLITIK HINDIA BELANDA

#### 3.1 Keadaan Sosial Politik Hindia Belanda Dibawah Kepemimpinan Gubernur Dirk Fock Periode 1922-1923

Dirk Fock merupakan seorang pejabat tinggi kolonial Belanda yang diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda pada tahun 1921 dan menjabat hingga tahun 1926. Ia memimpin Hindia-Belanda pada masa transisi penting, ketika kebijakan kolonial menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya kesadaran politik rakyat bumiputera dan berkembangnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Menurut Sugiarnik, jabatan gubernur jenderal pada awal abad ke-20 tidak hanya berfungsi sebagai administrator kolonial, tetapi juga sebagai penentu arah politik dan ideologis pemerintah kolonial dalam menghadapi dinamika sosial dan politik di Hindia-Belanda<sup>65</sup>.

Dirk Fock dikenal sebagai gubernur jenderal yang memiliki orientasi kuat terhadap stabilitas pemerintahan dan keamanan kolonial. Latar belakang birokratis dan pengalamannya dalam struktur pemerintahan Belanda membentuk pandangannya bahwa Hindia-Belanda harus tetap berada di bawah kendali ketat pemerintah kolonial, terutama ketika muncul berbagai gerakan politik yang menuntut perubahan struktural dalam sistem kolonial<sup>66</sup>.

Masa pemerintahan Dirk Fock berlangsung dalam situasi sosial-politik yang kompleks. Pasca-Perang Dunia I, Hindia-Belanda mengalami perubahan sosial yang signifikan, ditandai dengan tumbuhnya kelas menengah bumiputera terdidik, meningkatnya urbanisasi, serta berkembangnya organisasi politik dan pers bumiputera. Kondisi ini mempercepat penyebaran ide nasionalisme, sosialisme, dan anti-kolonialisme di kalangan masyarakat<sup>67</sup>.

Dalam perspektif historiografi Belanda, perkembangan tersebut dipandang sebagai bentuk ketidakstabilan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

---

<sup>65</sup> Sugiarnik, I. "Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dan Kebijakannya pada Tahun 1900–1945 serta Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi". (Jurnal SINDANG, 2010. 4(2), hlm. 152.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 153

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 154

Syukur menjelaskan bahwa pemerintah kolonial cenderung memandang gerakan bumiputera sebagai ancaman terhadap otoritas kolonial, bukan sebagai ekspresi aspirasi politik yang sah<sup>68</sup>. Cara pandang inilah yang sangat memengaruhi kebijakan politik Dirk Fock selama masa kepemimpinannya.

Tahun 1922 menandai awal pemerintahan Dirk Fock sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia memimpin dalam situasi meningkatnya kesadaran politik bumiputra pasca Perang Dunia I serta berkembangnya organisasi-organisasi pergerakan yang mulai bergerak ke arah politik radikal. Pada periode ini, pemerintah kolonial masih mempertahankan kerangka Politik Etis, tetapi mulai menunjukkan sikap waspada terhadap aktivitas politik rakyat pribumi. Secara sosial, kondisi masyarakat Hindia Belanda masih ditandai oleh ketimpangan struktural yang tajam antara penguasa kolonial dan rakyat bumiputra. Modernisasi ekonomi kolonial tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Ketimpangan ini mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan buruh dan petani yang kemudian menjadi basis sosial gerakan nasionalis dan kiri. Pemerintahan Fock mulai memperkuat sistem pengawasan terhadap organisasi-organisasi pergerakan, meskipun pada tahap ini kebijakan represif belum diterapkan secara terbuka.<sup>69</sup>

Pada tahun 1923, situasi politik Hindia Belanda menunjukkan peningkatan radikalisasi gerakan rakyat. Pemogokan buruh, terutama di sektor transportasi dan perkebunan, mulai marak dan dipandang sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas ekonomi kolonial. Organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam dan kelompok kiri semakin aktif menyuarakan kritik terhadap kapitalisme kolonial dan eksploitasi ekonomi.

Pemerintah kolonial di bawah Dirk Fock merespons perkembangan ini dengan mulai memperketat kebijakan politik. Aparat kolonial memperluas penggunaan hukum pidana untuk membatasi kegiatan politik yang dianggap subversif. Pers

---

<sup>68</sup> Syukur, A. "*Historiografi Belandasentris: Pembentukan dan Perkembangannya*". (Jurnal Sejarah Lontar, 2010) (2), hlm. 21

<sup>69</sup> Takashi Shiraishi, 1990. "*An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926*". Ithaca: Cornell University Press, hlm. 240–244.

bumiputra mulai diawasi secara ketat, dan rapat-rapat politik harus memperoleh izin dari pemerintah. Tahun ini menandai awal pergeseran dari pendekatan administratif-liberal menuju kebijakan yang lebih represif.<sup>70</sup>

Imperialisme dan kapitalisme kolonial Belanda adalah suatu nafsu, suatu politik sistem yang menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atas negeri bangsa lain. Imperialisme kolonial Belanda abad ke-20 menimbulkan dampak negatif terutama di bidang ekonomi dan sosial. Sistem perkebunan besar, pertambangan, dan industri yang dibangun diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan kolonial Belanda sehingga rakyat pribumi hanya menjadi tenaga kerja murah, sementara hasil bumi dan sumber daya alam diekspor ke Belanda tanpa memberi keuntungan berarti bagi masyarakat lokal. Akibatnya, kesenjangan antara penguasa kolonial dan rakyat semakin lebar, dengan mayoritas penduduk Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan.<sup>71</sup>

Sistem kapitalisme yang dilakukan oleh Kolonial Belanda ini juga menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi yang sangat besar. Kaum pribumi dipaksa bekerja dengan upah rendah, sementara elite kolonial dan segelintir pengusaha swasta mendapat keuntungan besar. Selain itu, sistem tersebut merusak tatanan ekonomi tradisional rakyat, karena lahan pertanian yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat beralih menjadi perkebunan komoditas ekspor. Akibatnya, rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, serta keterbelakangan, meskipun negeri ini kaya akan sumber daya.<sup>72</sup>

Begitulah kapitalisme yang melahirkan modern-imperialisme yang praktiknya ternyata menyebabkan kesengsaraan, kelaparan, pengangguran, kemiskinan bahkan sampai kematian. Dengan hal ini Sukarno menegaskan bahwa sebagai orang yang nasionalis haruslah mempunyai tujuan untuk menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari penindasan kapitalisme dan imperialisme.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Ruth T. McVey, 1965. *"The Rise of Indonesian Communism"* Ithaca: Cornell University Press, hlm. 186–190.

<sup>71</sup> Sukarno. *"Swadeshi dan Massa-Aksi di Indonesia"*, dalam *Fikiran Ra'jat*, 1932, dimuat dalam *(Dibawah Bendera Revolusi, 1964)* hlm 125

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 122-126

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 182

### 3.2 Kebijakan Politik Gubernur Jenderal Dirk Fock Terhadap Gerakan Bumiputera 1924-1925

Pada tahun 1924, pemerintahan Dirk Fock semakin menegaskan prioritasnya pada stabilitas dan keamanan kolonial. Aktivitas organisasi pergerakan dipantau secara sistematis melalui intelijen kolonial. Pemerintah mulai menggunakan kewenangan luar biasa untuk membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul, terutama terhadap organisasi yang memiliki afiliasi dengan sosialisme dan komunisme. Secara sosial, tekanan ekonomi terhadap rakyat bumiputra semakin terasa akibat kebijakan kolonial yang berorientasi pada kepentingan modal Eropa. Kondisi ini justru memperluas basis sosial gerakan perlawanan. Pemerintah kolonial melihat bahwa persoalan sosial dan politik tidak lagi terpisah, melainkan saling berkaitan, sehingga pendekatan represif dipandang sebagai solusi untuk mengendalikan keduanya.<sup>74</sup>

Masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dirk Fock merupakan periode krusial dalam perkembangan hubungan antara pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan pergerakan politik bumiputera. Pada fase ini, pergerakan nasional Indonesia mengalami transformasi dari gerakan sosial-kultural menuju gerakan politik yang lebih terorganisasi dan memiliki tujuan yang semakin jelas, yaitu menuntut perubahan mendasar terhadap sistem kolonial. Kondisi tersebut menempatkan pemerintah kolonial, khususnya di bawah kepemimpinan Dirk Fock, pada posisi mempertahankan kekuasaannya.

Dirk Fock memandang pergerakan bumiputera sebagai fenomena politik yang berpotensi mengganggu stabilitas kolonial. Dalam pandangan pemerintah Hindia-Belanda, organisasi-organisasi bumiputera tidak hanya berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat, tetapi juga sebagai sarana penyebaran ideologi yang dinilai berbahaya, seperti nasionalisme radikal, sosialisme, dan komunisme. Oleh karena itu, kebijakan politik yang diterapkan oleh Dirk Fock lebih menekankan pada

---

<sup>74</sup> J. Th. Lindblad, 1996. *"The Indonesian Economy since 1800"* Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 108–111.

pengawasan, pembatasan, dan penindasan terhadap aktivitas politik bumiputera, daripada pemberian ruang partisipasi politik yang lebih luas<sup>75</sup>.

Tahun 1925 menjadi titik penting dalam pemerintahan Dirk Fock karena kebijakan represif mulai dilembagakan secara sistematis. Pemerintah kolonial secara terbuka menggunakan pasal-pasal hukum darurat untuk membungkam kritik politik. Penangkapan tanpa proses pengadilan dan pembuangan politik ke luar Jawa mulai diterapkan terhadap tokoh-tokoh pergerakan.

Dalam konteks sosial, ketegangan antara rakyat bumiputra dan pemerintah kolonial semakin meningkat. Rakyat tidak hanya mengalami penindasan ekonomi, tetapi juga pembatasan hak-hak politik secara menyeluruh. Kondisi ini menciptakan iklim ketidakpercayaan terhadap pemerintah kolonial dan memperkuat keyakinan bahwa perubahan tidak dapat dicapai melalui jalur kooperatif. Situasi inilah yang kemudian menjadi lahan subur bagi berkembangnya ideologi perlawanan, termasuk embrio Marhaenisme yang mulai dirumuskan oleh Sukarno.<sup>76</sup>

Salah satu bentuk kebijakan politik utama pada masa Dirk Fock adalah penguatan sistem pengawasan terhadap organisasi politik bumiputera. Pemerintah kolonial melakukan pemantauan intensif terhadap kegiatan organisasi, rapat-rapat politik, serta aktivitas tokoh-tokoh pergerakan. Organisasi yang memiliki basis massa luas dan kemampuan mobilisasi rakyat dipandang sebagai ancaman serius. Sugiarnik menjelaskan bahwa pada periode ini, pemerintah kolonial semakin selektif dalam memberikan izin kegiatan organisasi politik bumiputera dan tidak segan-segan membubarkan kegiatan yang dinilai melampaui batas toleransi kolonial<sup>77</sup>.

Selain pengawasan, Dirk Fock juga menerapkan kebijakan represif melalui penggunaan instrumen hukum kolonial. Peraturan-peraturan kolonial dimanfaatkan untuk membatasi kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Pers bumiputera, yang menjadi salah satu media utama penyebaran gagasan nasionalisme, berada di bawah sensor ketat pemerintah. Surat kabar dan majalah

---

<sup>75</sup> Sugiarnik, I. *Op. Cit*, Hlm. 153.

<sup>76</sup> Peter Kasenda, *Op.cit* hlm. 52–56.

<sup>77</sup> Sugiarnik, I. *Op. Cit*, hlm. 154

yang mengkritik kebijakan kolonial atau mengampanyekan kesadaran politik rakyat sering kali dikenai pembredelan atau sanksi hukum<sup>78</sup>. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial berusaha mengontrol wacana publik agar tidak berkembang menjadi kritik terbuka terhadap kekuasaan Belanda.

Pendekatan represif tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara pandang historiografi dan ideologi kolonial yang bersifat Belandasentris. Syukur menegaskan bahwa dalam perspektif Belandasentris, pemerintah kolonial menempatkan dirinya sebagai penjaga ketertiban dan kemajuan, sementara gerakan bumiputera dipersepsikan sebagai bentuk ketidaktaatan dan gangguan terhadap tatanan kolonial<sup>79</sup>. Cara pandang ini membuat pemerintah Hindia-Belanda, termasuk Dirk Fock, cenderung menolak tuntutan politik bumiputera dan lebih memilih pendekatan keamanan dibandingkan dialog politik.

Dalam praktiknya, kebijakan politik Dirk Fock juga mencakup penindakan langsung terhadap tokoh-tokoh pergerakan bumiputera. Pemerintah kolonial tidak segan melakukan penangkapan, penahanan, hingga pembuangan terhadap aktivis yang dianggap berbahaya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melemahkan kepemimpinan pergerakan dan mencegah meluasnya pengaruh ide nasionalisme di kalangan rakyat. Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu meningkatnya solidaritas dan kesadaran politik di kalangan masyarakat bumiputera.

Menjelang akhir masa kepemimpinan Dirk Fock, situasi politik Hindia-Belanda semakin menunjukkan ketegangan antara pemerintah kolonial dan pergerakan bumiputera. Organisasi-organisasi politik bumiputera terus berkembang dan mencari strategi baru untuk menyasati pembatasan yang diberlakukan pemerintah. Tekanan politik pada masa ini menjadi salah satu faktor yang mendorong konsolidasi organisasi politik bumiputera pada periode selanjutnya, termasuk penguatan partai-partai nasionalis pada akhir dekade 1920-an<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Sugiarnik, I. *Loc.cit.*

<sup>79</sup> Syukur, A. *Op. Cit.*, hlm. 22

<sup>80</sup> Valentina, N. "PNI Organisasi Politik Sesudah 1926". (HEURISTIK: Jurnal Pendidikan Sejarah, 2022 )2(1), 38-44.

Secara keseluruhan, kebijakan politik Gubernur Jenderal Dirk Fock terhadap pergerakan bumiputera mencerminkan ketidaksiapan pemerintah kolonial dalam menghadapi tuntutan politik rakyat secara demokratis. Pendekatan pengawasan dan represi yang diterapkan selama masa kepemimpinannya memang berhasil menjaga stabilitas kolonial dalam jangka pendek, tetapi gagal mengatasi akar persoalan ketidakadilan politik dan sosial. Dalam perspektif sejarah, kebijakan-kebijakan tersebut justru mempercepat proses delegitimasi kekuasaan kolonial dan memperkuat kesadaran nasional rakyat Indonesia.

### **3.3 Akhir Masa Kepemimpinan Dirk Fock dan Dampaknya Tahun 1926**

Menjelang akhir masa kepemimpinannya pada tahun 1926, Gubernur Jenderal Dirk Fock menghadapi situasi politik dan sosial yang semakin kompleks di Hindia-Belanda. Kebijakan pengawasan dan represi yang diterapkan selama masa pemerintahannya memang mampu menjaga stabilitas kolonial dalam jangka pendek, namun tidak berhasil meredam berkembangnya kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan rakyat bumiputera. Sebaliknya, tekanan politik yang terus-menerus justru memperlihatkan adanya ketegangan struktural antara pemerintah kolonial dan masyarakat jajahan yang semakin sulit untuk dikendalikan<sup>81</sup>.

Situasi sosial politik Hindia Belanda mencapai titik krisis. Pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatra Barat menjadi puncak akumulasi ketegangan sosial-politik selama masa pemerintahan Dirk Fock. Pemerintah kolonial merespons dengan tindakan represif besar-besaran, termasuk penangkapan massal dan pembuangan politik ke Boven Digul.<sup>82</sup>

Pada fase akhir kepemimpinan Dirk Fock, pemerintah kolonial semakin menunjukkan sikap defensif terhadap pergerakan bumiputera. Organisasi-organisasi politik bumiputera tetap berada dalam pengawasan ketat, sementara

---

<sup>81</sup> Sugiarnik, I. *Op. cit.* hlm. 156

<sup>82</sup> John Ingleson, 1979. "Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927–1934" Singapore: Heinemann, hlm. 1–5.

kebebasan berpendapat dan aktivitas pers masih dibatasi. Menurut Sugiarnik, situasi ini menandai kegagalan pendekatan kolonial yang mengandalkan kontrol dan pembatasan sebagai solusi utama dalam menghadapi tuntutan politik rakyat<sup>83</sup>. Pemerintah kolonial belum menunjukkan kesiapan untuk membuka ruang dialog politik yang lebih inklusif, meskipun tekanan dari pergerakan nasional semakin menguat.

Dampak langsung dari kebijakan politik pada akhir masa kepemimpinan Dirk Fock adalah semakin terpolarisasinya hubungan antara pemerintah kolonial dan pergerakan bumiputera. Ketidakpuasan terhadap kebijakan kolonial mendorong organisasi-organisasi politik bumiputera untuk memperkuat konsolidasi internal dan mencari strategi baru dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Valentina menjelaskan bahwa tekanan politik yang dialami organisasi bumiputera pada pertengahan hingga akhir 1920-an justru menjadi salah satu faktor pendorong munculnya bentuk-bentuk perlawanan politik yang lebih terorganisasi pada periode selanjutnya<sup>84</sup>.

Selain itu, kebijakan represif pada masa akhir kepemimpinan Dirk Fock juga berdampak pada semakin meluasnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat bumiputera. Pembatasan kebebasan politik dan pers tidak sepenuhnya berhasil membungkam suara pergerakan, melainkan memicu munculnya solidaritas dan simpati masyarakat terhadap tokoh-tokoh pergerakan yang mengalami penindasan. Dalam perspektif historiografi Belandasentris, kondisi ini sering kali direduksi sebagai gangguan keamanan, padahal secara historis justru mencerminkan dinamika kesadaran politik rakyat yang semakin matang<sup>85</sup>.

Dari sisi pemerintahan kolonial, berakhirnya masa kepemimpinan Dirk Fock menandai berlanjutnya pola kebijakan kolonial yang bersifat represif pada periode-periode berikutnya. Pendekatan keamanan dan pengawasan tetap menjadi instrumen utama pemerintah Hindia-Belanda dalam menghadapi pergerakan nasional. Namun, kegagalan kebijakan tersebut pada masa Dirk Fock memberikan

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 157

<sup>84</sup> Valentina, N. *Op. cit.* hlm. 42

<sup>85</sup> Syukur, A. *Op. cit.* hlm. 24



pelajaran penting bahwa stabilitas kolonial yang dibangun melalui represi tidak mampu menyelesaikan persoalan ketidakadilan politik dan sosial yang mendasar.

Akhir masa kepemimpinan Dirk Fock dan dampaknya memiliki arti penting dalam perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahannya justru mempertegas garis konflik antara pemerintah kolonial dan rakyat bumiputera, serta mempercepat proses delegitimasi kekuasaan kolonial Belanda. Dengan demikian, meskipun Dirk Fock berusaha mempertahankan tatanan kolonial melalui kontrol politik yang ketat, warisan kebijakannya secara tidak langsung turut mendorong lahirnya pergerakan nasional yang semakin kuat dan terorganisasi pada dekade berikutnya.

Secara keseluruhan, periode 1922–1926 di bawah kepemimpinan Dirk Fock menunjukkan transformasi Hindia Belanda dari koloni dengan ruang politik terbatas menuju negara kolonial yang semakin represif. Kebijakan-kebijakan Fock tidak hanya gagal meredam gerakan perlawanan, tetapi justru mempercepat radikalisasi politik rakyat bumiputra. Dalam konteks inilah, kondisi sosial-politik pada masa pemerintahan Dirk Fock dapat dipahami sebagai latar struktural yang melahirkan ideologi-ideologi perlawanan nasional, termasuk Marhaenisme.

Keadaan sosial politik Hindia Belanda pada periode 1922–1926 di bawah kepemimpinan Dirk Fock menunjukkan semakin sempitnya ruang politik bagi rakyat bumiputra. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang cenderung represif, seperti pembatasan kebebasan berserikat, pengawasan ketat terhadap pers, serta penindakan terhadap aktivitas politik yang dianggap mengganggu ketertiban kolonial. Kondisi ini memperkuat ketimpangan sosial dan politik antara penguasa kolonial dan masyarakat pribumi, sekaligus menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan petani, buruh, dan kaum terdidik bumiputra. Dalam perspektif teori gerakan sosial, situasi tersebut dapat dipahami sebagai tekanan struktural yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dan keinginan untuk melakukan perubahan melalui tindakan bersama.

Dengan semakin terbatasnya jalur politik yang bersifat kooperatif, perjuangan rakyat mulai bergeser ke arah gerakan yang lebih tegas dan konfrontatif. Penutupan ruang dialog oleh pemerintah kolonial justru mempercepat radikalisasi gerakan

nasional dan mendorong lahirnya ideologi perjuangan yang berpihak pada rakyat kecil. Oleh karena itu, kondisi sosial politik pada masa pemerintahan Dirk Fock dapat dipandang sebagai fondasi penting bagi kemunculan Marhaenisme pada periode berikutnya, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Bab ini dengan demikian menjelaskan bahwa Marhaenisme lahir sebagai respons atas tekanan kolonial yang bersifat struktural, dan menjadi jembatan antara kondisi sosial-politik Hindia Belanda dengan praktik gerakan politik rakyat pada periode 1927–1931.

Korelasi antara BAB III dan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Macionis, menunjukkan bahwa pada periode 1922–1926 telah terbentuk basis sosial gerakan, terutama di kalangan buruh, petani kecil, dan kaum terdidik bumiputra. Menurut teori gerakan sosial, keberadaan basis sosial yang mengalami penderitaan bersama merupakan syarat penting bagi munculnya gerakan kolektif. Ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, serta marginalisasi politik menciptakan pengalaman sosial yang sama, yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya solidaritas dan kesadaran kelas. Kondisi inilah yang kemudian memungkinkan munculnya Marhaenisme sebagai ideologi yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kecil dalam bahasa politik yang mudah dipahami.